



RENCANA KERJA TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT

Jl. Provinsi Km 1 Penajam

Telp. (0542) 7200413 - Fax. (0542) 7200320

E-mail : inspektorat.ppu@gmail.com Penajam 76141 - Kalimantan Timur



KATA PENGANTAR

Rencana kerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja ini memuat program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja tahun 2020 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi dan visi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sepenuhnya dapat ditujukan pada rencana kerja tahun 2020 ini.

Penajam, Juli 2019
Inspektur,


Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	8
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
B. Capaian Program dan Kegiatan	11
C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2018	15
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
B.. Program dan Kegiatan	22
C. Lokasi Kegiatan dan Kebutuhan Dana Indikatif	27
4. BAB IV PENUTUP	28

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	10
Tabel 2. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018.....	11
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Tahun 2018.....	17
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Inspektorat	21
Tabel 5. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran	21
Tabel 6. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target 2020	26



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Pikir Penyajian Rencana Kinerja Tahunan	3
--	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance. Kepemerintahan yang baik (good governance) saat ini merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), serta laporan pertanggungjawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Rencana Kerja merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Tahun 2020 adalah pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang memuat sasaran strategis yang sudah tercapai



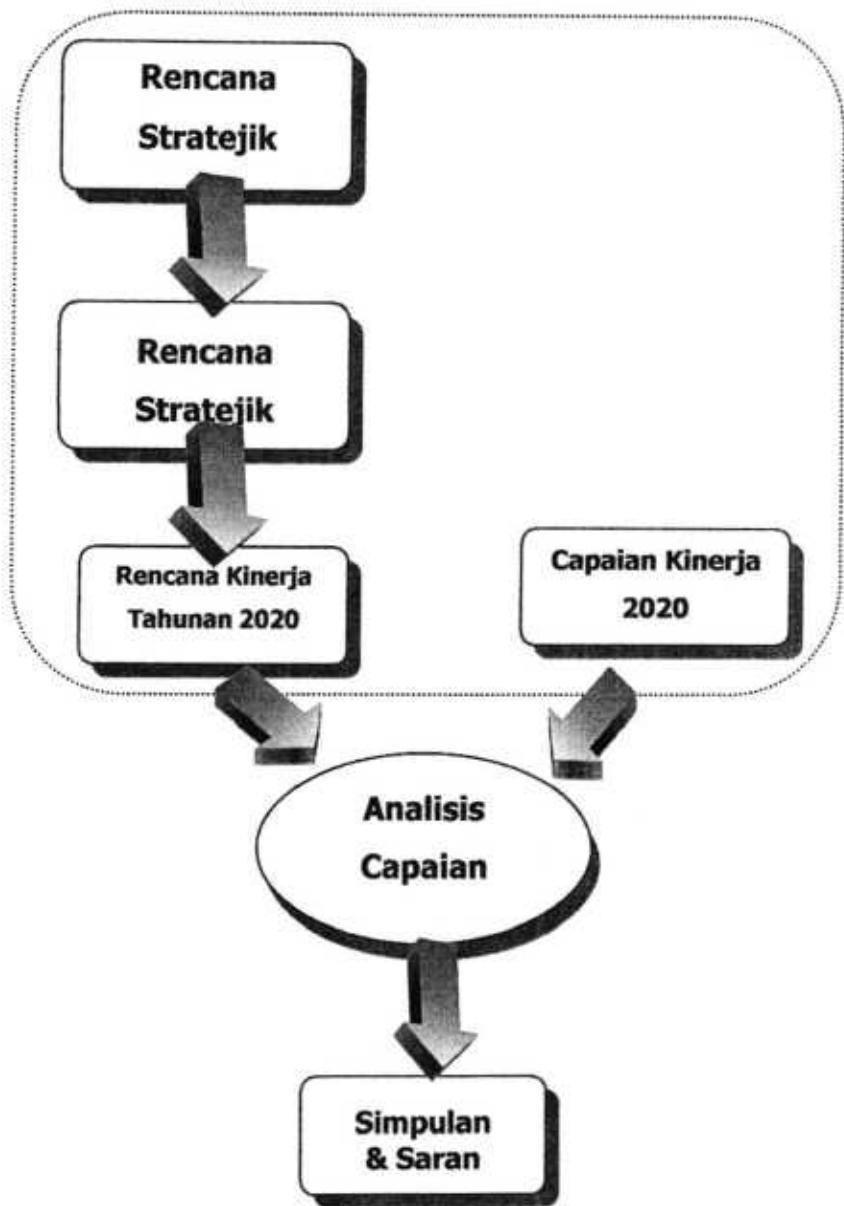
maupun yang belum tercapai. Dari Sasaran Strategis Inspektorat yang belum tercapai yaitu Masyarakat dan aparatur memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara aman dan damai dengan Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Sasaran Strategis kedua yang belum tercapai yaitu Manajemen Pemerintahan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan secara terpadu dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat dengan Indikator Kinerja Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat. Rencana Kinerja Tahun 2020 juga merupakan tindak lanjut untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2020 yang didasarkan atas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Rencana Kinerja Tahunan dapat diilustrasikan dalam bagan berikut :



Gambar 1.
Alur pikir penyajian Rencana Kinerja Tahunan



Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2020.



B. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);



-
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
 12. Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.



C. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas.
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis.
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk.
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang rinci, terarah dan terukur serta melaksanakan program dan kegiatan yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan prioritas program pembangunan



yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.



D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD
- B. Capaian Program dan Kegiatan
- C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
- D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- B. Program dan Kegiatan
- C. Lokasi Kegiatan dan Kebutuhan Dana Indikatif

4. BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Secara umum, pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dicapainya 3 sasaran yang telah ditargetkan, 6 program dan 34 kegiatan, dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi dari 75,00% - 100%. Dari rentang capaian tersebut, diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar **110,31 %** dengan interpretasi "**Sangat Berhasil**".

Perolehan rata-rata nilai kinerja dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	500 %
1. Meningkatnya Penerapan Manajemen Pemerintahan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Secara Terpadu dan Tepat Waktu	1. Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengawasan 2. Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan 3. Persentase tingkat pengaduan masyarakat 4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan 5. Penyajian laporan keuangan sesuai SAP 6. Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu 7. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 8. Meningkatkan nilai indeks pencapaian target kinerja 9. Predikat hasil evaluasi Zona Integritas 10. Peningkatan kapabilitas APIP	4 Kegiatan 100% 100% 100% 1 Dokumen 4 LHA B (70%) 85 WBK Level 3	4 Kegiatan 100% 100% 100% Dokumen 3 LHA CC (57,10%) 59,07 Level 3	100% 100% 100% 100% 500% 75% 81,57 % 69,49 %
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Jumlah Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	2. Peningkatan opini audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	WTP	100%
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan intern pemerintahan	1. Persentase Auditor yang lulus Sertifikasi Auditor 2. Ketersediaan sarana dan prasarana	100% 5 Kegiatan	95% 5 Kegiatan	95% 100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018				Rp. 5.765.945.818,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018				Rp. 5.579.443.480,00

B. Capaian Program dan Kegiatan

Untuk capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang meliputi 6 program dan 34 kegiatan, secara fisik dicapai 96,77% dengan penyerapan dana sebesar 96,77% sebagaimana tabel capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. PPU Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PROGRAM/KEGIATAN	Satuan	Target dalam 1 Tahun	*) Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu	1. Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan Rakorwas tingkat propinsi, regional dan nasional Rapat Pemutakhiran	Kegiatan	4	4	100,00%



		data tingkat propinsi dan regional				
2.	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)	Persen	100%	100%	100,00%
3.	Persentase tingkat pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus /khusus)	Persen	100%	100%	100,00%
4.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persen	100%	100%	100,00%
5.	Penyajian laporan keuangan sesuai SAP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Review Laporan Keuangan	Dokumen	1	3	300,00%
6.	Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Laporan	2	3	150,00%



	7. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi LAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Pemda PPU	Nilai	B	CC	
	8. Peningkatan nilai indeks pencapaian target kinerja	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB)	Nilai	85	59,07	
	9. Predikat hasil evaluasi Zona Integritas	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)	Predikat	WBK		
	10. Peningkatan kapabilitas APIP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Evaluasi Penerapan SPIP	Predikat	Level 3	Level 3	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1 Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen	1	1	100,00%
	2. Peningkatan Opini audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pendampingan dan pengawasan Eksternal	Predikat	WTP	WTP	



Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	1. Persentase Auditor yang lulus sertifikasi Auditor	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persen	100%	95%	95%
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan	5	5	100,00%



C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2018

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), maka Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal secara berkala ini sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditargetkan semula hanya 30 LHP dan sampai dengan akhir tahun pengawasan mencapai 153 LHP.

2. Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemeriksaan Kasus/Khusus).

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan khusus yang ditargetkan 15 LHP, pada akhir tahun 2018 terdapat 9 kasus pengaduan masyarakat, telah diterbitkan laporan pemeriksaan kasus sebanyak 4 LHP.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2018. Sasaran pelaksanaan reviu laporan keuangan ini adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dalam rangka mencapai opini WTP oleh BPK-RI.

Kegiatan pemeriksaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan PKPT, dan dilakukan reviu laporan keuangan terhadap semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.



4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi LKIP SKPD, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2018 ini dilaksanakan pada 20 OPD dan telah dilaksanakan evaluasi LKIP pada 20 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sasaran pelaksanaan evaluasi LKIP ini adalah kesesuaian visi, misi, program dan kegiatan, output, outcome, sasaran dan indikator kinerja SKPD. Penilaian LKIP OPD terbagi atas 5 (lima) kategori dengan nilai rata-rata hasil kinerja 57,10 (cukup).

5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

Melaksanakan pemantauan/monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan 314 temuan pemeriksaan, dengan jumlah rekomendasi 718 rekomendasi, yang sudah selesai 640 rekomendasi, 72 dalam proses dan 6 tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah.

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD maupun instansi-instansi terkait.

6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Dalam rangka peningkatan SDM Aparatur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 telah melaksanakan dan mengikuti berbagai Diklat, Sosialisasi dan Bimtek antara lain :

- Diklat Kolaborasi Integritas (FIN-WKI)
- Diklat Maturitas SPIP
- Audit Investigatif
- Pelatihan PUG
- Pengawasan Program Inovasi Desa
- Penilaian Resiko
- Diklat Inpassing
- Pengelola Aset Desa dan Aplikasi SIPADES
- Kapabilitas APIP
- Penjengjangan Auditor Muda
- Audit Kinerja
- Sertifikasi JFA



Untuk pencapaian realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

No.	BELANJA APARATUR	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.039.685.818,00	4.017.105.678	99,44
	1. Belanja Pegawai : a. Gaji Pegawai	4.039.685.818,00	4.017.105.678	99,44
2.	Belanja Langsung	1.726.260.000,00	1.562.337.802	90,50
	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang & Jasa 3. Belanja Modal	339.940.000,00 1.386.320.000,00 -	330.620.000,00 1.231.717.802,00 -	97,26 88,85 -
Jumlah		5.765.945.818,00	5.579.443.480,00	96,77%

Pada tahun anggaran 2018 ini, dimana telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan tahun anggaran 2017, selanjutnya bila dikaitkan dengan Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan, maka telah diakomodir dalam Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2020 ini.

Secara garis besar sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam Rencana Startegik (Renstra) Tahun 2018 s/d 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Anggaran Kegiatan Langsung (RAKL) dan tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagian telah dicapai capaian kinerjanya, dan diharapkan pada tahun 2020 semua sasaran, program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan sedangkan beberapa penyebab tidak tercapainya target sebagaimana yang telah direncanakan adalah :

- a. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada pengurangan personil /SDM di Inspektorat Kabupaten



Penajam Paser Utara yang berdampak pada berpengaruhnya pelaksanaan tugas pengawasan.

- b. Adanya perubahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang lebih menekankan kepada optimalisasi pengawasan kinerja pada SKPD di Kabupaten Penajam Paser Utara guna mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser oleh BPK-RI.

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Mengikutsertakan para aparat pengawasan / auditor maupun calon auditor pada Pendidikan dan Pelatihan teknis yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau melakukan rekrutmen terhadap Auditor / calon auditor guna memaksimalkan pelaksanaan pengawasan, sehingga tugas – tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Melakukan pengkajian dan analisa serta evaluasi terhadap peraturan perundang – undangan yang akan ataupun telah ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Hal ini berkenaan dengan optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Penajam Paser dalam bentuk-bentuk optimalisasi dalam pelaksanaan pemberian advis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan dan lain- lain.



D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan :

1. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusannya yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP.
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
3. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
4. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
5. Bagaimana upaya dan komitmen Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang langsung dari usulan masyarakat belum dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, namun secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah telah terjadi penurunan kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan pemberantasan KKN dengan melakukan monitoring Percepatan Pemberantasan KKN Kabupaten Penajam Paser Utara.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis lembaga pengawasan, maka Visi yang ditetapkan sesuai dengan misi organisasi adalah :

*"Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baik
Melalui Pengawasan Yang Profesional"*

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempunyai misi antara lain :

1. Mendorong tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government);
2. Tercapainya pelaksanaan Pengawasan Yang Berkualitas.

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Visi dan misi tersebut di atas akan dicapai melalui tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Inspektorat**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu.
		2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2	Terwujudnya Pengawasan Yang Berkualitas oleh APIP	1 Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

Tabel 5. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengawasan2. Persentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan5. Penyajian laporan keuangan sesuai SAP6. Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu7. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja OPD8. Peningkatan nilai indeks pencapaian target kinerja9. Predikat hasil evaluasi Zona Integritas10. Peningkatan kapabilitas APIP11. Peningkatan Maturitas SPIP
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan2. Peningkatan Opini Audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)3. Jumlah aktivitas konsultasi
3.	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah APIP yang mengikuti diklat2. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)3. Ketersediaan sarana dan prasarana



B. Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program sebanyak 6 program, dimana yang bersifat prioritas sebanyak 2 program dan yang bersifat penunjang sebanyak 4 program dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH;
- b. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan;
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

2. Kegiatan

Untuk mendukung program-program tersebut diatas, telah ditetapkan kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH.
 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 2. Pemeriksaan khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah



3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK
4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP
5. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPMRB)
7. Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara
8. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu
9. Pendampingan Pengawasan Eksternal
10. Review Laporan Keuangan
11. Evaluasi Penerapan SPIP
12. Pemeriksaan bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya
13. Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
14. Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
15. Layanan Konsultasi
16. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender
17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN
18. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - Monitoring Bantuan Operasional Sekolah
 - Monitoring Dana Desa
19. Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
20. Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



- b. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan
 - 1. Rakornas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional
 - 2. Rapat Pemutahiran Data Tingkat Propinsi dan Regional
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - 1. Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
 - 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 12. Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP
 - 13. Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan Dalam Daerah



- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - 3. Pengadaan Meubelair
 - 4. Pengadaan peralatan Kantor
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - 1. Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - 2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)
 - 3. Survei Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Suoervisi Pencegahan (Korupgah Stranas) KPK

3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja baik input, output, outcome dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut baik Inspektur, Irban ,auditor beserta staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik komputer, kendaraan, LCD (infocus) sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.

2. Indikator Keluaran (*output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik, contohnya berapa buah bangunan yang terlaksana, jumlah orang yang dikirim dalam diklat dsb.



3. Indikator Hasil (outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Contohnya antara lain meningkatnya pemahaman peserta Diklat terhadap materi yang diajarkan, meningkatnya pelayanan yang dilakukan atas kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan dan lain-lain.

Adapun kelompok sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target 2020

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)		TARGET TAHUN 2020 (4)
1.	Meningkatnya Penerapan manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan Pengawasan secara terpadu dan tepat waktu	1.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan	4 keg
		2.	Percentase laporan terhadap hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	100%
		3.	Percentase penanganan pengaduan masyarakat	100%
		4.	Percentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90%
		5.	Penyajian laporan keuangan daerah sesuai SAP	7 Dok
		6.	Jumlah laporan secara berkala dan tepat waktu	6 Laporan
		7.	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B
		8.	Peningkatan nilai indeks pencapaian target kinerja	85
		9.	Predikat hasil evaluasi Zona Integritas	WBK
		10.	Peningkatan kapabilitas APIP	Level 3
		11.	Peningkatan Maturitas SPIP	Level 3
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1.	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Keg
		2.	Peningkatan Opini audit BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP
		3.	Jumlah aktivitas konsultasi	60 kali
3.	Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	1.	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	10 Orang
		2.	Jumlah Pelatihan kantor Sendiri (PKS)	10 Kegiatan
		3.	Ketersediaan sarana dan prasarana	5 Keg



C. Lokasi Kegiatan dan Kebutuhan Dana Indikatif

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 6 (enam) program yang menjadi dasar tujuan yang dapat diwujudkan dalam 4 (empat) program penunjang dan 2 (dua) program prioritas dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan anggaran biaya sebesar Rp **8.903.196.957,-**

Dengan rincian masing-masing sesuai program dan kegiatan (terlampir).



BAB IV PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 3 sasaran dengan 6 program dan 44 kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri maupun pihak yang berkepentingan lainnya guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan yang konsisten dan berkomitmen.

Penajam, Juli 2019
Inspektur,



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011

LAMPIRAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

INSTANSI : INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	00	01	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Inspektorat	12 bln	6.184.244.388			12 bln	6.493.456.607	
3	00	01	5	2	BELANJA LANGSUNG	Inspektorat	12 bln	2.718.952.569			12 bln	2.573.100.561	
3	00	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	890.192.570	APBD		100%	913.702.199
3	00	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	Inspektorat	12 bln	60.000.000		12 bln	63.000.000
3	00	01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Inspektorat	12 bln	180.000.000		12 bln	189.000.000
3	00	01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dioperasionalkan	Inspektorat	12 bln	50.000.000		12 bln	52.500.000
3	00	01	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	Inspektorat	12 bln	189.680.000		12 bln	199.164.000
3	00	01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							
					- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan Kantor Bersih dan Terawat	Inspektorat	12 bln	32.000.000		12 bln	33.600.000	
					- Belanja gorden	Ruang Rapi, Bersih dan Nyaman	Inspektorat	1 paket	-			-	
3	00	01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	56.912.570		12 bln	59.758.199
3	00	01	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	50.000.000		12 bln	52.500.000
3	00	01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	Inspektorat	12 bln	5.000.000		12 bln	5.250.000	
					- Tambah Daya Listrik 20.000 kwh	Peningkatan Daya Listrik	Inspektorat	1 Paket	20.000.000			-	
3	00	01	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Perundang- Undangan	Inspektorat	12 bln	5.000.000		12 bln	5.250.000
3	00	01	01	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersediannya bahan makanan & minuman	Inspektorat	12 bln	20.000.000		12 bln	21.000.000
3	00	01	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke luar daerah	Kab. PPU dan luar daerah	12 bln	150.000.000		12 bln	157.500.000
3	00	01	01	01	20	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP	Peningkatan Operasional Kantor	Inspektorat	12 bln	66.600.000		12 bln	69.930.000

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
3	00	01	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke dalam daerah	Kab. PPU	12 bln	5.000.000			12 bln	5.250.000	
3	00	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	312.880.606	APBD		100%	67.725.000	
3	00	01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	20.000.000			12 bln	21.000.000	
3	00	01	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor									
						- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	30.000.000				-	
						- Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	500.000			12 bln	525.000	
						- Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	5.000.000			12 bln	5.250.000	
						- Pemeliharaan server SIMWAS	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	30.000.000			12 bln	31.500.000	
						- Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	9.000.000			12 bln	9.450.000	
3	00	01	01			Pengadaan Meubelair									
						- Meja Kerja masing-masing @25 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	@25 unit	23.296.950				-	
						- Kursi Kerja masing-masing @25 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	@25 unit	23.296.950				-	
						- Almari locker 25 locker	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	25 locker	18.000.000				-	
						- Sofa tamu Inspektur 1 set	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 set	4.800.000				-	
						- Almari Arsip Besi 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 unit	10.047.572				-	
3	00	01	01			Pengadaan Peralatan Kantor									
						- Laptop/ Notebook 5 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	5 unit	60.456.420				-	
						- Printer 3 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	3 unit	13.175.160				-	
						- PC Desktop All In One 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 unit	23.873.874				-	
						- AC 2 PK 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 unit	26.400.000				-	
						- Pengadaan APAR 5 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	5 unit	7.500.000				-	
						- Pengadaan Hardisk Eksternal 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 unit	2.533.680				-	
						- Mesin Ketik 2 Unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 unit	5.000.000				-	

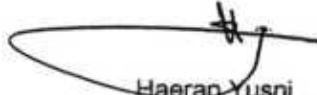
KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif (Rp)
3	00	01	01	15	00	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			100%	1.115.089.393	APBD		100%	1.170.843.863
3	00	01	01	15	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Audit Operasional, Audit Kinerja dan PDTT, Probity Audit, Audit Investigasi, Validasi Kewajiban)	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	Kab. PPU	100%	363.129.393			100%	381.285.863
3	00	01	01	15		Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. PPU	1 Kegiatan	220.100.000				231.105.000
3	00	01	01	15	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kab. PPU dan luar daerah	10 kegiatan	75.000.000			10 kegiatan	78.750.000
3	00	01	01	15	09	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kab. PPU dan luar daerah	85	20.000.000			85	21.000.000
3	00	01	01	15	10	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Jumlah evaluasi Lakip SKPD	Kab. PPU	B	20.000.000			B	21.000.000
3	00	01	01	15	11	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya peninjauan pembangunan di Kab. PPU	Kab. PPU	6 laporan	10.000.000			7 laporan	10.500.000
3	00	01	01	15		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi								
						- Monitoring Bantuan Operasional Sekolah	Terlaksananya monitoring Bantuan	Kab. PPU	1 Kegiatan	10.000.000			1 Kegiatan	10.500.000
						- Monitoring Dana Desa	Terlaksananya Monitoring Dana Desa	Kab. PPU	1 Kegiatan	10.000.000			1 Kegiatan	10.500.000
3	00	01	01	15	12	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan	Kab. PPU	2 kegiatan	20.000.000			1 kegiatan	21.000.000
3	00	01	01	15	13	Reviu Laporan			8 dokumen				8 dokumen	
						- Reviu Revisi RPJMD	Terlaksananya reviu RPJMD Pemerintah	Kab. PPU	1 dokumen	-			1 Kegiatan	-
						- Reviu RKPD	Terlaksananya reviu RKPD Pemerintah	Kab. PPU	2 dokumen	9.940.000			2 kegiatan	10.437.000
						- Reviu LPPD	Terlaksananya reviu LPPD Pemerintah	Kab. PPU	1 dokumen	-			1 Kegiatan	-
						- Reviu RKA SKPD	Terlaksananya reviu RKA Pemerintah	Kab. PPU	2 dokumen	22.400.000			2 kegiatan	23.520.000
						- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu laporan Keuangan	Kab. PPU	1 dokumen	7.900.000			1 Kegiatan	8.295.000
						- Reviu LKIP Kabupaten	Terlaksananya reviu LKIP Pemerintah	Kab. PPU	1 dokumen	6.470.000			1 Kegiatan	6.793.500
						- Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Dana Desa	Terlaksananya reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Dana Desa Pemerintah Daerah	Kab. PPU	4 dokumen	2.500.000			1 Kegiatan	2.625.000
						- Reviu DAK fisik	Terlaksananya reviu DAK Fisik Pemerintah	Kab. PPU	1 dokumen	18.650.000			1 Kegiatan	19.582.500
3	00	01	01	15	14	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		Kab. PPU dan luar daerah						
						- Peningkatan level kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Kab. PPU dan luar daerah	Level 3	39.200.000			Level 3	41.150.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakaraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
						- Peningkatan level maturitas SPIP	Peningkatan Level Maturitas SPIP	Kab. PPU dan luar daerah	Level 3	29.200.000			Level 3	30.660.000
3	00	01	01	15	15	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	10.000.000			1 Kegiatan	10.500.000
3	00	01	01	15	16	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tercapainya penyampaian LHKASN yang terverifikasi	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	10.000.000			1 Kegiatan	10.500.000
3	00	01	01	15	17	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya SABER PUNGLI	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	70.600.000			1 Kegiatan	74.130.000
3	00	01	01	15	18	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pengaduan masyarakat	Kab. PPU	100%	45.000.000			100%	47.250.000
3	00	01	01	15		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kab. PPU	100%	40.000.000			100%	42.000.000
3	00	01	01	15		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kab. PPU	90%	20.000.000			90%	21.000.000
3	00	01	01	15		Layanan Konsultasi	Terlaksanannya Pelayanan Konsultasi	Inspektorat	60 kali	10.000.000			60 kali	10.500.000
3	00	01	01	15		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender	Kab. PPU	1 kegiatan	5.000.000			1 kegiatan	5.250.000
3	00	01	01	15		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Kab. PPU	1 kegiatan	15.000.000			1 kegiatan	15.750.000
3	00	01	01	15		Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Kab. PPU	1 Kegiatan	5.000.000			1 Kegiatan	5.250.000
3	00	01	01	16		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			100%	205.000.000	APBD		100%	215.250.000
3	00	01	01	16	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	35 Orang	200.000.000			35 Orang	210.000.000
						- Audit Kinerja	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang	21.780.000			2 Orang	22.869.000
						-Probit Audit	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang	21.780.000			2 Orang	22.869.000

KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
		- Audit Barjas	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang	21.780.000			2 Orang	22.869.000
		- Audit Berbasis Resiko	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang	21.780.000			2 Orang	22.869.000
		- Ujian sertifikasi auditor pertama	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	1 Orang	5.850.000			1 Orang	6.142.500
		- Sertifikasi P2UPD	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	3 Orang	64.870.000			3 Orang	68.113.500
		- Manajemen Pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	3 Orang	-			3 Orang	-
		- Diklat Teknis Lainnya	Jumlah Pelatihan pengembangan SDM APIP Inspektorat	Luar Daerah	20 Orang	42.160.000			20 Orang	44.268.000
3 00 01 01 16 03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah Pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas SDM Auditor	Kab. PPU	10 Kegiatan	5.000.000			10 Kegiatan	5.250.000	
3 00 01 01 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				100%	165.790.000	APBD		100%	174.079.500
3 00 01 01 17 03	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Presentasi pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	Luar Daerah	1 Kegiatan	25.000.000			1 Kegiatan	26.250.000	
3 00 01 01 17 04	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Terciptanya wilayah zona WBK	Kab. PPU dan luar daerah	WBK	10.000.000			WBK	10.500.000	
2 00 01 01 17	Survei Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK					130.790.000				137.329.500
	- Survei Penilaian Integritas KPK	Terlaksanannya Survei Penilaian Integritas	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan				1 Kegiatan		
	- Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah Stranas) KPK	Terlaksanannya Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan				1 Kegiatan		

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
3	00	01	01	19			Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan			100%	30.000.000	APBD		100%	31.500.000
01	20	05	05	19	01		Rakorwas Tk.Prov, Regional dan Nasional	Terlaksananya program kerja Pengawasan	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	15.000.000			1 Kegiatan	15.750.000
01	20	05	05	19	02		Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Terlaksananya rapat pemutakhiran data	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	15.000.000			1 Kegiatan	15.750.000
JUMLAH										8.903.196.957				9.066.557.169	

Penajam,
Inspektur,
Juli 2019



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Penajam Paser Utara

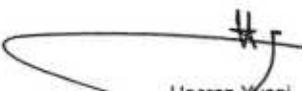
OPD : Inspektorat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir/janji		Anggaran	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		12 bln	12 bln	6.184.244.388	6.493.456.607
	BELANJA LANGSUNG		12 bln	12 bln	2.718.952.569	2.573.100.561
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	890.192.570	913.702.199
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	12 bln	12 bln	60.000.000	63.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bln	12 bln	180.000.000	189.000.000
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dioperasionalkan	12 bln	12 bln	50.000.000	52.500.000
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	12 bln	12 bln	189.680.000	199.164.000
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan Kantor Bersih dan Terawat	12 bln	12 bln	32.000.000	33.600.000
-	Belanja gorden	Ruangan Rapi, Bersih dan Nyaman	1 paket	1 paket	-	-
f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	12 bln	12 bln	56.912.570	59.758.199
g	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	12 bln	12 bln	50.000.000	52.500.000
h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	12 bln	12 bln	5.000.000	5.250.000
-	Tambah Daya Listrik 20.000 kwh	Peningkatan Daya Listrik	1 paket	1 paket	20.000.000	-
j	Penyediaan Bahari Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Perundang-Undangan	12 bln	12 bln	5.000.000	5.250.000
k	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan & minuman	12 bln	12 bln	20.000.000	21.000.000
l	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke luar daerah	12 bln	12 bln	150.000.000	157.500.000
m	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol pp	Peningkatan Operasional Kantor	12 bln	12 bln	66.600.000	69.930.000
n	Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke dalam daerah	12 bln	12 bln	5.000.000	5.250.000
						-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	312.880.606	67.725.000
a	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	12 bln	12 bln	20.000.000	21.000.000
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 bln	12 bln		-
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	Tersedianya sarana & prasarana aparatur			30.000.000	-
-	Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	Tersedianya sarana & prasarana aparatur			500.000	525.000
-	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer	Tersedianya sarana & prasarana aparatur			5.000.000	5.250.000
-	Pemeliharaan server SIMWAS	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	12 bln	12 bln	30.000.000	31.500.000
-	Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	12 bln	12 bln	9.000.000	9.450.000
c	Pengadaan Meubelair					-
-	Meja Kerja masing-masing @25 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	925 unit	-	23.296.950	-
-	Kursi Kerja masing-masing @25 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	925 unit	-	23.296.950	-
-	Almari locker 25 locker	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	25 locker	-	18.000.000	-
-	Sofa tamu Inspektor 1 set	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	1 set	-	4.800.000	-
-	Almari Arsip Besi 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	2 unit	-	10.047.572	-
d	Pengadaan Peralatan Kantor			-		-
-	Laptop/ Notebook 5 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	5 unit	-	60.456.420	-
-	Printer 3 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	3 unit	-	13.175.160	-
-	PC Desktop All In One 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	2 unit	-	23.873.874	-
-	AC 2 PK 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	2 unit	-	26.400.000	-
-	Pengadaan APAR 5 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	5 unit	-	7.500.000	-
-	Pengadaan Hardisk Eksternal 2 unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	2 unit	-	2.533.680	-
-	Mesin Ketik 2 Unit	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	2 unit	-	5.000.000	-

3.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100%	100%	1.115.089.393	1.170.843.863
a	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Audit Operasional, Audit Kinerja dan PDTT, Probit, Audit Audit Investigasi, Validasi Kewajiban)	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan objek pengawasan	62 LHP	62 LHP	553.150.203	551.245.613
b	Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	220.100.000	231.105.000
c	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	10 kegiatan	10 Kegiatan	75.000.000	78.750.000
d	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	85	85	20.000.000	21.000.000
e	Evaluasi Lapik Satuan Kerja	Jumlah evaluasi Lapik SKPD	B	B	20.000.000	21.000.000
f	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya peninjauan pembangunan di Kab. PPU	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	10.500.000
g	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi					
-	Monitoring Bantuan Operasional Sekolah	Terlaksananya monitoring Bantuan Operasional Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.500.000
-	Monitoring Dana Desa	Terlaksananya Monitoring Dana Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.500.000
h	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan Eksternal	2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000	21.000.000
i	Reviu Laporan		8 dokumen	8 dokumen		
-	Reviu RPJMD	Terlaksananya reviu RPJMD Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
-	Reviu RKPD	Terlaksananya reviu RKPD Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	9.940.000	10.437.000
-	Reviu LPPD	Terlaksananya reviu LPPD Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
-	Reviu RKA SKPD	Terlaksananya reviu RKA Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	22.400.000	23.520.000
-	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	7.900.000	8.295.000
-	Reviu LKIP Kabupaten	Terlaksananya reviu LKIP Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	6.470.000	6.793.500
-	Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Dana Desa	Terlaksananya reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Dana Desa Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	2.500.000	2.625.000
-	Reviu DAK fisik	Terlaksananya reviu DAK Fisik Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	18.650.000	19.582.500
j	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)					
-	Peningkatan level kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3	39.200.000	41.160.000
-	Peningkatan level maturitas SPIP	Peningkatan Level Maturitas SPIP	level 3	level 3	29.200.000	30.660.000
k	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.500.000
l	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tercapainya penyampaian LHKASN yang terverifikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.500.000
m	Saku Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya SABER PUNGLI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.600.000	74.130.000
n	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pengaduan masyarakat	100%	100%	45.000.000	47.250.000
o	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	100%	40.000.000	42.000.000
p	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	90%	90%	20.000.000	21.000.000
q	Layanan Konsultasi	Terlaksanannya Pelayanan Konsultasi	60 kali	60 kali	10.000.000	10.500.000
r	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender	1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000	5.250.000
s	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000	15.750.000
t	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Terlaksanannya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	5.250.000
4.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		100%	100%	205.000.000	215.250.000
a	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	35 Orang	35 Orang	200.000.000	210.000.000
-	Audit Kinerja	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	2 Orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000
-	Probit Audit	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	2 Orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000
-	Audit Barjas	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	2 Orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000
-	Audit Berbasis Resiko	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	2 Orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000

- Ujian sertifikasi auditor pertama	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1 Orang	1 Orang	5.850.000	6.142.500
- Sertifikasi P2UPD	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3 Orang	3 Orang	64.870.000	68.113.500
- Manajemen Pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	2 Orang	2 Orang	-	-
- Diklat Teknis Lainnya	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	20 Orang	20 Orang	42.160.000	44.268.000
b Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah Pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas SDM Auditor	10 Kegiatan	10 Kegiatan	5.000.000	5.250.000
					-
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100%	100%	165.790.000	174.079.500
a Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Presentasi pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000	26.250.000
b Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Terciptanya wilayah zona WBK	WBK	WBK	10.000.000	10.500.000
c Survei Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK				130.790.000	137.329.500
- Survei Penilaian Integritas KPK	Terlaksanannya Survei Penilaian Integritas	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
- Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah Stranas) KPK	Terlaksanannya Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK	1 Kegiatan			
6. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan		100%	100%	30.000.000	31.500.000
a Rakorwas Tk.Prov,Regional dan Nasional	Terlaksananya program kerja Pengawasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	15.750.000
b Pelaksanaan Rapat Permutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Terlaksananya rapat permutakhiran data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	15.750.000
JUMLAH				8.903.196.957	9.066.557.169

Penajam,
Juli 2019
Inspektur,


Haeran Yusni
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196202211985031011

Daftar Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2020

OPD : Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Volume (4)	Alasan (5)
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Audit Operasional, Audit Kinerja dan PDTT)	Kab. PPU	100%	Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
2	Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. PPU	100%	Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
3	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	100%	Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
				Melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK	Kab. PPU	100%	Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
				Melaksanakan Peraturan BPK RI Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700.05/90/2017 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Kab. PPU
5	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP	Kab. PPU	90%	Melaksanakan peraturan BPK RI Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700.05/90/2017 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Kab. PPU
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
6	Evaluasi Laki Satuan Kerja	Kab. PPU	15 LHA	Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019

				Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tetang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
				Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
				Melaksanakan Keputusan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 700/SK-005/Itkab/VI/2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/SK-004/Itkab/VI/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018
7	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMIRB)	Kab. PPU dan luar daerah	85%	Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
				Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/200/2015 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/169/2015 tentang Penunjukan Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
8	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	35 Orang	Peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan kapabilitas APIP level 3 dan mengikuti kalender diklat BPKP
	- Audit Kinerja	Luar Daerah	2 Orang	
	- Probity Audit	Luar Daerah	2 Orang	
	- Audit Barjas	Luar Daerah	2 Orang	
	- Audit Berbasis Resiko	Luar Daerah	2 Orang	
	- Ujian sertifikasi auditor pertama	Luar Daerah	1 Orang	
	- Sertifikasi P2UPD	Luar Daerah	3 Orang	
	- Manajemen Pengawasan		3 Orang	
	- Diklat Teknis Lainnya	Luar Daerah	20 Orang	
9	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kab. PPU	10 Kegiatan	Untuk mentransfer ilmu yang telah di dapat oleh Auditor pada waktu diklat/workshop/sosialisasi kepada teman auditor supaya terjadi pemerataan SDM
10	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Kab. PPU	6 laporan	Melaksanakan Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

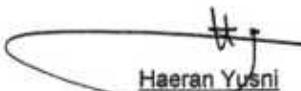
			Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
11	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		Melaksanakan Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser
	- Monitoring Bantuan Operasional Sekolah	Kab. PPU	Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
	- Monitoring Dana Desa	Kab. PPU	1 Kegiatan
12	Pertemungan Pengawasan Eksternal	Kab. PPU	1 kegiatan
13	Reviu Laporan		8 dokumen
	- Reriu Revisi RPJMD	Kab. PPU	1 dokumen
	- Reriu RKPD	Kab. PPU	2 dokumen
	- Reriu LPPD	Kab. PPU	1 dokumen
	- Reriu RKA SKPD	Kab. PPU	2 dokumen
	- Reriu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	1 dokumen
	- Reriu LKIP Kabupaten	Kab. PPU	1 dokumen
	- Reriu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa,	Kab. PPU	4 dokumen
	- Reriu DAK fisik	Kab. PPU	1 dokumen
14	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kab. PPU dan luar daerah	Melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 -2019
	- Peningkatan level kapabilitas APIP	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan
	- Peningkatan level maturitas SPIP	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan
			Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/SK-009/Iit-Kab/VII/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menuju Level 3 Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
			Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
15	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Kab. PPU dan luar daerah	10 kegiatan
			Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
			Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
16	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan
			Kegiatan pemeriksaan tertentu atau khusus yang dilaksanakan bersama dengan Auditor lainnya di luar Inspektorat Kabupaten PPU
17	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan
			Melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

				Melaksanakan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 700/021/SK/Iit-Kab/XI/2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi serta Klarifikasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kab.PPU
				Melaksanakan Instruksi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.55/242/2015 tentang Penyampaian laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
18	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	<p>Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019</p>
				Melaksanakan Instruksi menteri Dalam negeri Nomor 180/3934/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar penyelenggaraan pemerintah daerah
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 356/408/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Penajam Paser Utara
19	Layanan Konsultasi	Inspektorat	60 kali	Merupakan program inovasi terbaru Inspektorat
20	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penginggaran Reponsif Gender	Kab. PPU	1 kegiatan	<p>Melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Reponsif Gender untuk Pemerintah Daerah</p> <p>Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019</p>
21	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Kab. PPU	1 kegiatan	Hasil Nota Kesepakatan Bersama antara OMBUDSMAN RI dgn Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ttg Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik di Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
				Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dengan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggara Pemerintah Daerah
22	Rakorwas Tk.Prov,Regional dan Nasional	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	Melaksanakan Agenda Nasional
23	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	Melaksanakan Agenda Nasional
24	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Luar Daerah	1 Kegiatan	Menyesuaikan agenda kegiatan Pusat untuk dilaksanakan di daerah
25	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Kab. PPU	1 Kegiatan	Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 800.05/132/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Unit Kerja pelayanan Melalui Upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016
				Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
26	Survei Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK			
	- Survei Penilaian Integritas KPK	Kab. PPU	1 Kegiatan	Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017
	- Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah Strategis) KPK	Kab. PPU	1 Kegiatan	
27	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Kab. PPU	1 Kegiatan	Melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863)
				Melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
				Melaksanakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :700/309/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara
				Melaksanakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :700.05/133/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Inspektorat	12 bln	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor setiap tahun agar terlihat bersih, indah dan nyaman
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 bln	Merupakan kegiatan setiap tahun
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	Inspektorat	12 bln	Dikarenakan jaringan kabel instalasi listrik sudah tidak memenuhi standart dan sering terjadi trip listrik
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon	Inspektorat	12 bln	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer	Inspektorat	12 bln	Dikarenakan banyak komputer dan printer yang rusak
	- Pemeliharaan server SIMWAS	Inspektorat	12 bln	Akan mengupdate server dan sistem aplikasi pengawasan
	- Pemeliharaan peralatan kantor	Inspektorat	12 bln	Dikarenakan banyak AC yang rusak
30	Pengadaan Meubelair			Adanya penambahan gedung baru
	- Meja dan Kursi Kerja masing-masing @25 unit	Inspektorat	@25 unit	
	- Almari locker	Inspektorat	25 locker	
	- Sofa tamu Inspektur 1 set	Inspektorat	1 set	
	- Kursi Rapat lipat 30 unit	Inspektorat	30 unit	
	- Almari Arsip Besi 5 unit	Inspektorat	5 unit	
31	Pengadaan Peralatan Kantor			Dikarenakan banyak yang sudah tidak dapat digunakan dan adanya penambahan personil Auditor
	- Laptop/ Notebook 30 unit	Inspektorat	30 unit	

- Printer 5 unit	Inspektorat	5 unit	
- PC Dekstop All in One 5 unit	Inspektorat	5 unit	
- AC 2 PK 5 unit	Inspektorat	5 unit	
- Pegadaan APAR 5 unit	Inspektorat	5 unit	
- Pegadaan Hardisk Eksternal 2 unit	Inspektorat	2 unit	
- M ain Ketik 2 Unit	Inspektorat	2 unit	
32 Pertjediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
33 Pertjediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
34 Pertjediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
35 Pertjediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
36 Pertjediaan Jasa Kebersihan Kantor			
- P ertjediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
- Belanja gorden	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
37 Pertjediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
38 Pertjediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
39 Pertjediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
- P ertjediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
- Tambah Daya Listrik 20.000 kwh	Inspektorat	12 bln	Adanya penambahan gedung baru dan penambahan daya di gedung yang lama
40 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
41 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
42 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kab. PPU dan luar daerah	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
43 Penyedia Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP	Inspektorat	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran
44 Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah	Kab. PPU	12 bln	Merupakan kegiatan wajib dan perlu adanya penambahan anggaran

Penajam, Juli 2019
Inspektur,



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011

PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2020-2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	Jenis Kegiatan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
3 00 01 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				orang	41	orang	41	orang	41	6.184.244.368	6.493.456.607	inspektorat	belanja pegawai					
3 00 01 5 2	BELANJA LANGSUNG										2.718.952.569	2.573.100.561	inspektorat	belanja pegawai					
3 00 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				%	100	%	100	%	100	890.192.570	813.702.189	inspektorat						
3 00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			inspektorat			bulan	12	bulan	12	60.000.000	63.000.000	inspektorat	Belanja pegawai, belanja barang & jasa					
3 00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik			inspektorat			bulan	12	bulan	12	180.000.000	189.000.000	inspektorat	Belanja barang & jasa					
3 00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinhan Kendaraan Dinas			inspektorat			bulan	12	bulan	12	50.000.000	52.500.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3 00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			inspektorat			bulan	12	bulan	12	189.680.000	199.164.000	inspektorat	Belanja pegawai					
3 00 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			inspektorat			bulan	12	bulan	12	32.000.000	33.600.000	inspektorat	Belanja pegawai, belanja barang & jasa					
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			inspektorat			bulan	12	bulan	12	-	-							
	- Belanja gorden			inspektorat			bulan	12	bulan	12	-	-							
3 00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			inspektorat			bulan	12	bulan	12	56.912.570	59.758.199	inspektorat	Belanja barang &jasa					
3 00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengpendaan			inspektorat			bulan	12	bulan	12	50.000.000	52.500.000	inspektorat	Belanja barang &jasa					
3 00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			inspektorat															
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			inspektorat			bulan	12	bulan	12	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
	- Tambah Daya Listrik 20.000 kwh			inspektorat			bulan	12	bulan	12	20.000.000	-	inspektorat						
3 00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			inspektorat			bulan	12	bulan	12	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3 00 01 01 17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman			inspektorat			bulan	12	bulan	12	20.000.000	21.000.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3 00 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		Kab. PPU dan luar daerah				bulan	12	bulan	12	150.000.000	157.500.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3 00 01 01 20	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP			inspektorat			bulan	12	bulan	12	66.600.000	69.930.000	inspektorat	Belanja pegawai					
3 00 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah		Kab. PPU				bulan	12	bulan	12	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01 01																			
3 00 01 01 10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				%	100	%	100	%	100	312.880.606	67.725.000	inspektorat						
3 00 01 01 11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			inspektorat			bulan	12	bulan	12	20.000.000	21.000.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3 00 01 01 12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						bulan	12	bulan	12	-	-	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01 01	- Belanja Pemeliharaan instalasi Listrik		inspektorat								30.000.000	-	inspektorat	Belanja barang dan jasa					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	Jenis Kegiatan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
01.01	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon			Inspektorat							500.000	525.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01.01	- Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer			Inspektorat							5.000.000	5.250.000	Inspektorat						
01.01	- Pemeliharaan server SIMWAS			Inspektorat			bulan	12	bulan	12	30.000.000	31.500.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01.01	- Pemeliharaan peralatan kantor			Inspektorat			bulan	12	bulan	12	9.000.000	9.450.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01.01	Pengadaan Meubelair												-	Inspektorat	Belanja modal				
01.01	- Meja Kerja masing-masing @25 unit			Inspektorat			unit	25	unit	25	23.296.950		-	Inspektorat					
01.01	- Kursi Kerja masing-masing @25 unit			Inspektorat			unit	25	unit	25	23.296.950		-	Inspektorat					
01.01	- Almari locker			Inspektorat			locker	25	locker	25	18.000.000		-	Inspektorat					
01.01	- Sofa tamu Inspektorat 1 set			Inspektorat			set	1	set	1	4.800.000		-	Inspektorat					
01.01	- Almari Arsip Besi 2 unit			Inspektorat			unit	2	unit	2	10.047.572		-	Inspektorat					
01.01	Pengadaan Peralatan Kantor												-	Inspektorat	Belanja modal				
01.01	- Laptop/ Notebook 5 unit			Inspektorat			unit	5	unit	5	60.456.420		-	Inspektorat					
01.01	- Printer 3 unit			Inspektorat			unit	3	unit	3	13.175.180		-	Inspektorat					
01.01	- PC Desktop All In One 2 unit			Inspektorat			unit	2	unit	2	23.873.874		-	Inspektorat					
01.01	- AC 2 PK 2 unit			Inspektorat			unit	2	unit	2	26.400.000		-	Inspektorat					
01.01	- Pengadaan APAR			Inspektorat			unit	5	unit	5	7.500.000		-	Inspektorat					
01.01	- Pengadaan Hardisk Eksternal			Inspektorat			unit	2	unit	2	2.533.680		-	Inspektorat					
01.01	- Mesin Ketik 2 Unit			Inspektorat			unit	2	unit	2	5.000.000		-	Inspektorat					
3.00.01.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				%	100	%	100	%	100	1.115.089.393	1.170.843.863	Inspektorat						
3.00.01.01.15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Audit Operasional, Audit Kinerja dan PDIT)			Kab. PPU				100	%	100	%	363.129.393	381.285.863	Inspektorat	Belanja barang dan jasa				
3.00.01.01.15	Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	220.100.000	231.105.000	Inspektorat	Belanja pegawai, belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif			Kab. PPU dan luar daerah			kali	10	kali	10	75.000.000	78.750.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15.09	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)			Kab. PPU dan luar daerah			nilai	85	nilai	85	20.000.000	21.000.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15.10	Evaluasi Lekpik Satuan Kerja			Kab. PPU			predikat	B	predikat	B	20.000.000	21.000.000	Inspektorat	Belanja pegawai					
3.00.01.01.15.11	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu			Kab. PPU			laporan	6	laporan	6	10.000.000	10.500.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi						kegiatan	1	kegiatan	1	10.000.000	10.500.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01.01	- Monitoring Bantuan Operasional Sekolah			Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	10.000.000	10.500.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
01.01	- Monitoring Dana Desa			Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	10.000.000	10.500.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15.12	Pendampingan Pengawasan Eksternal			Kab. PPU			kegiatan	2	kegiatan	2	20.000.000	21.000.000	Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
3.00.01.01.15.13	Reviu Laporan				dokumen	8	dokumen	8					Inspektorat	Belanja barang dan jasa					
	- Reviu RPJMD			Kab. PPU	dokumen	1	dokumen	1					Inspektorat						
	- Reviu RKPD			Kab. PPU	dokumen	2	dokumen	2			9.940.000	10.437.000	Inspektorat						
	- Reviu LPPD			Kab. PPU	dokumen	1	dokumen	1					Inspektorat						
	- Reviu RKA SKPD			Kab. PPU	dokumen	2	dokumen	2			22.400.000	23.520.000	Inspektorat						
	- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. PPU	dokumen	1	dokumen	1			7.900.000	8.295.000	Inspektorat						
	- Reviu LKIP Kabupaten			Kab. PPU	dokumen	1	dokumen	1			6.470.000	6.793.500	Inspektorat						
	- Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Dana Desa			Kab. PPU	dokumen	4	dokumen	4			2.500.000	2.625.000	Inspektorat						
	- Reviu DAK fisik			Kab. PPU	dokumen	1	dokumen	1			18.650.000	19.582.500	Inspektorat						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	Jenis Kegiatan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
3 00 01 01 15 14	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		Kab. PPU dan luar daerah													Belanja barang dan jasa			
	- Peningkatan level kapabilitas APIP		Kab. PPU dan luar daerah			tingkat	level 3	tingkat	level 3	39.200.000	41.160.000	inspektorat							
	- Peningkatan level maturitas SPIP		Kab. PPU dan luar daerah			tingkat	level 3	tingkat	level 3	29.200.000	30.660.000	inspektorat							
3 00 01 01 15 15	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya		Kab. PPU dan luar daerah			kegiatan	1	kegiatan	1	10.000.000	10.500.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15 16	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		Kab. PPU dan luar daerah			kegiatan	1	kegiatan	1	10.000.000	10.500.000	inspektorat	Belanja pegawai						
3 00 01 01 15 17	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)		Kab. PPU dan luar daerah			kegiatan	1	kegiatan	1	70.600.000	74.130.000	inspektorat	Belanja pegawai, belanja barang & jasa						
3 00 01 01 15 18	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah		Kab. PPU			%	100	%	100	45.000.000	47.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK		Kab. PPU			%	100	%	100	40.000.000	42.000.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP		Kab. PPU			%	90	%	90	20.000.000	21.000.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Layanan Konsultasi		inspektorat			kali	60	kali	60	10.000.000	10.500.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender		Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APIH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN		Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	15.000.000	15.750.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 15	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi		Kab. PPU			kegiatan	1	kegiatan	1	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa						
3 00 01 01 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				%	100	%	100	%	100	205.000.000	216.250.000	inspektorat						
3 00 01 01 16 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Luar Daerah			orang	35 Orang	orang	35 Orang	200.000.000	210.000.000	inspektorat	Belanja barang & jasa						
	- Audit Kinerja		Luar Daerah			orang	2 Orang	orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000	inspektorat							
	- Probaty Audit		Luar Daerah			orang	2 Orang	orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000	inspektorat							
	- Audit Barjas		Luar Daerah			orang	2 Orang	orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000	inspektorat							
	- Audit Berbasis Resiko		Luar Daerah			orang	2 Orang	orang	2 Orang	21.780.000	22.869.000	inspektorat							
	- Ujian sertifikasi auditor pertama		Luar Daerah			orang	1 Orang	orang	1 Orang	5.650.000	6.142.500	inspektorat							
	- Sertifikasi P2UPD		Luar Daerah			orang	3 Orang	orang	3 Orang	64.870.000	68.113.500	inspektorat							
	- Manajemen Pengawasan		Luar Daerah				3 Orang		3 Orang	-	-	inspektorat							
	- Didlat Teknis lainnya		Luar Daerah			orang	20 Orang	orang	20 Orang	42.160.000	44.266.000	inspektorat							

K	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	Jenis Kegiatan					
					Hasil Program		Keleuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3 00 01	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)				
3 00 01	16 03 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)		Kab. PPU		kegiatan	10	kegiatan	10	5.000.000	5.250.000	inspektorat	Belanja barang & jasa							
3 00 01	17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				%	100	%	100	%	100	165.790.000	174.079.500	inspektorat						
3 00 01	17 03 Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Luar Daerah		kegiatan	1	kegiatan	1	25.000.000	26.250.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa							
3 00 01	17 04 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)(WBSM)		Kab. PPU		predikat	WBK	predikat	WBK	10.000.000	10.500.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa							
3 00 01	17 Survei Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK										130.790.000	137.329.500	inspektorat	Belanja barang dan jasa					
	- Survei Penilaian Integritas KPK		Kab. PPU		kegiatan	1	kegiatan	1											
	- Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Stranas) KPK		Kab. PPU		kegiatan	1	kegiatan	1											
3 00 01	19 Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan				%	100	%	100	%	100	30.000.000	31.500.000	inspektorat						
01 20 05	19 01 Rakorwas Tk.Prov, Regional dan Nasional		Kab. PPU dan luar daerah		kegiatan	1	kegiatan	1	15.000.000	15.750.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa							
01 20 05	19 02 Pelaksanaan Rapat Permutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional		Kab. PPU dan luar daerah		kegiatan	1	kegiatan	1	15.000.000	15.750.000	inspektorat	Belanja barang dan jasa							
JUMLAH										8.903.196.957	9.066.557.169								

Penajam, Juli 2019
Inspektorat



Haeran Yusni
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211985031011